



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara)

Lailyl Usri

Universitas Negeri Medan

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh PAD dan DBH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Populasi dalam penelitian adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dengan sampel 22 Kabupaten/Kota dengan kriteria Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010-2011. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling dan model regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pendapatan asli daerah ($0,000 < 0,05$), nilai signifikansi dana bagi hasil ($0,043 < 0,05$), dan secara simultan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$).

Keywords

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Daerah (BD)

PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan kepemimpinan dari orde baru menuju orde reformasi, pola hubungan pemerintahan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata menimbulkan ketidakadilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999 diubah menjadi desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Ketika otonomi daerah mulai digulirkan, harapan yang muncul adalah semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun penggunaan daerahnya masing-masing karena daerah diberikan kebebasan untuk mengelola wilayahnya sendiri. Kemandirian daerah tersebut dimanifestasikan lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada

daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah kabupaten maupun kota untuk melaksanakan pembangunan (Irafahmi:2009)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darmono:2010). Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu, artinya APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di lakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar tersebut dan salah satu komponen dana adalah Dana Bagi Hasil (DBH). DBH dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu untuk menandai kegiatan khusus yang merupakan kegiatan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DBH dalam penerimaan daerah masih cukup tinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain. Hal ini menunjukkan

masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemasokan dana dari pemerintah pusat ini.

LPEM-FEUI (2000) menyatakan bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh sebab itu, jika pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan sumber daya alam yang dimiliki. Apabila pendapatan yang diperoleh semakin tinggi maka transfer DBH yang diterima pun cenderung akan semakin besar.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahmawati (2010) dengan judul "Pengaruh PAD dan DAU terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah". Penelitian ini menggunakan sampel periode tahun 2007-2009. Sedangkan penulis sekarang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan sampel tahun 2010-2011.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Sumatera Utara yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu : <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Teknik dokumentasi yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Teknik Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui beberapa buku bacaan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini seperti buku-buku dan undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian atas hipotesis 1 dan hipotesis 2 untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dihitung dengan menggunakan uji statistik t. Berikut ini tabel hasil uji t :

Hasil Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t) Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.623	.633		13.620	.000
	LN_PAD	.275	.064	.571	4.315	.000
	LN_DBH	.185	.089	.276	2.088	.043

a. Dependent Variable: LN_BD

Sumber : *Output SPSS*

Hasil uji t tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 pada signifikansi 0,05. Nilai t_{hitung} sebesar 4,315, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,019. Hal ini berarti nilai t_{hitung} (4,315) > t_{tabel} (2,019) dan hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Variabel dana bagi hasil memiliki nilai signifikansi sebesar 0,043 pada signifikansi 0,05. Nilai t_{hitung} sebesar 2,088, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 2,019. Hal ini berarti nilai t_{hitung} (2,088) > t_{tabel} (2,019) dan hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi 0,043 < 0,05, maka disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Uji dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah secara bersama-sama. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 16, maka diperoleh hasil seperti pada tabel 4.11.

**Hasil Uji F
ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.324	2	6.162	33.432	.000 ^a
	Residual	7.557	41	.184		
	Total	19.881	43			

a. Predictors: (Constant), LN_DBH, LN_PAD

b. Dependent Variable: LN_BD

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 33,432 sedangkan nilai $F_{tabel} = 3,225$ dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti nilai $F_{hitung} (33,432) > F_{tabel} (3,225)$, berarti keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah karena $F_{hitung} > F_{tabel} (33,432 > 3,225)$ dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dengan pemahaman bahwa apabila belanja modal menurun maka dapat dipastikan bahwa belanja langsung juga akan menurun karena belanja modal merupakan bagian dari pada belanja langsung.

Pernyataan Friedman (1978) dalam Rahmawati (2010) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah (Mardiasmo, 2002). Seperti yang di ketahui belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan bagian dari belanja daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin besar Pendapatan

Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 0,043 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rahmawati dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah". Menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil berkaitan erat dengan belanja daerah. Dana bagi hasil merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah agar dapat memenuhi pembiayaan daerah melalui pendapatan yang diperoleh berdasarkan potensi daerah masing-masing.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Uji F diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai F_{hitung} sebesar 33,432. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($33,432 > 3,225$), maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan ada pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara bersama-sama terhadap belanja daerah

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat dilihat pada nilai t_{hitung} ($4,315$) $>$ t_{tabel} ($2,019$). Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat dilihat pada nilai t_{hitung} ($2,088$) $>$ t_{tabel} ($2,019$). Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.
3. Hasil uji F menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hal ini dapat dilihat pada nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} (33,432 > 3,225), yang berarti menerima hipotesis tiga (H_3).

REFERENCES

- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPFPE.
- . Nordiawan, Deddi dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Restianto, E Yanuar dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Irafahmi, Diana Tien, 2009, *Studi Komparasi Pengukuran Kinerja Finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan Blitar*, Jurnal Modernisasi Vol. 5 No. 2.
- Hasyim, Muttaqim. 2009. <http://muttaqinhasyim.wordpress.com/2009/07/06/isi-laporan-realisisi-anggaran/> (06 Juli 2009).
- Gurning, Ryrin. 2011. <http://ryringurning.edublogs.org/2011/02/20/tugas-dana-alokasi-umum-dan-laporan-realisisi-anggaran/> (20 Februari 2011).
- Yaya, Atta. 2008. <http://www.attayaya.net/2008/10/fungsi-apbd.html> (Oktober 2008).
- Novianto, Aryes. 2003. <http://www.aryesnovianto.com/2003/02/pengertian-pendapatan-asli-daerah.html> (Februari 2003).
- Pendidikan, Kabar. 2011. <http://kabar-pendidikan.blogspot.com/2011/05/strategi-meningkatkan-pendapatan-asli.html> (Mei 2011).
- Hairunisya, Nanis, 2008, *Penilaian Kinerja Bagian Keuangan Pemkab Probolinggo Menggunakan Analisis Rasio Keuangan APBD*. Jurnal Ekonomika Vol. 2 No. 2, 43-48.
- Pakde, Catatan. 2010. <http://catatanpakde.blogspot.com/2010/02/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah.html> (10 Maret 2010)
- Siahaan, P Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sukaisih, Ni Ketut dan I Made Sudana, 2006, *Good Governance Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) dan Implikasinya*, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Wicaksana Vol. 15 No.2.

Isdijoso, Brahmantio, ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL PADA ERA OTONOMIDAERAH (Studi Kasus : Sektor pendidikan di Kota Surakarta), Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol. 6 No. 1, 2002.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Darmono, ANALISIS DANA BAGI HASIL PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH KABUPATEN BERAU, STIE Muhammadiyah tanjung Redeh Vol. 11 No. 2, 2010.

Fakultas Ekonomi, 2008. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program S1*. Medan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<http://www.djpk.depkeu.go.id>